

PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL

Febrila Arifpraja

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: This research is a descriptive research which is a research that intend to analize the political dynamics that occur to LAMR (Lembaga Adat Melayu Riau/Riau Malay Customary Institutions) related to local politics, and their reaction to those political dynamics, especially in 2018 Regional (Riau Province) and 2019 Presidential (Indonesia) Election. The research result is showing that LAMR can't be separated from local politics events that occur in Riau. This is because LAMR management & members are consist of influential traditional leaders that looked up by people in society, their influence attracts political candidate in looking of vote or endorsement. Plenty of pressure is given to LAMR to use Identity Politics to enlarge the chance or having a Regional/Presidential leader that care & close to Riau Malay Ethnic Society.

Abstrak: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dinamika yang terjadi pada Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) berkaitan dengan dinamika politik lokal, serta sikap LAMR dalam menghadapi dinamika tersebut, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 dan Pemilihan Presiden tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan terlihat LAMR tidak bisa dipisahkan dari peristiwa-peristiwa politik lokal yang terjadi di Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan di dalam LAMR sendiri ada banyak Tokoh-Tokoh adat yang juga merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan didengar oleh masyarakat banyak, sehingga banyak calon yang mencari simpati masyarakat lewat dukungan atau setidaknya kedekatan dengan Lembaga Adat Melayu Riau. Ada banyak tuntutan kepada LAMR untuk bersikap menggunakan politik identitas agar memperbesar kesempatan untuk mendapatkan Kepala Daerah maupun Kepala Negara yang peduli dan dekat dengan masyarakat adat Melayu Riau.

Kata Kunci: LAMR, politik lokal, politik identitas

PENDAHULUAN

Kuatnya ikatan kekerabatan (darah dan kekeluargaan) dan kesamaan kesukuan, bahasa, dan adat-istiadat merupakan faktor-faktor primordial yang membentuk perilaku memilih masyarakat. Dilihat dari fakta objektif yang diuraikan diatas, yang mengindikasikan bahwa perilaku memilih tokoh masyarakat di Provinsi Riau, masih tergolong sektarian dan dapat menghambat proses demokratisasi di tingkat lokal.

Demikian juga yang dapat dilihat pada Lembaga Adat Melayu Riau. Dalam setiap kesempatan pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di Provinsi Riau, para calon kandidat berlomba mendatangi balai adat selaku kantor dari Lembaga Adat Melayu Riau. Bentuknya dikemas dalam berbagai macam kegiatan, entah itu tepung tawar, seminar, diskusi, atau sekedar silaturahmi para calon kepada para pemuka adat yang ada di LAM Riau.

Pada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Riau tahun 2013, LAMR bukan hanya menjadi tempat untuk para calon kandidat mencari simpati. Pada saat itu juga LAMR memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pemilihan dimulai dari tahapan awal bekerja sama dengan KPU melalui kegiatan tepung tawar seluruh kandidat, hingga mengadakan sebuah pertemuan silaturahmi pada saat pilkada telah selesai untuk menjaga suasana kondusif dalam pelaksanaan pilkada.

Menjelang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Riau tahun 2018 pun, LAMR sudah kedatangan banyak calon untuk mendapatkan dukungan atau sekedar restu dari LAMR. Diantaranya adalah Petahana Andi Rahman, Syamsuar, Syamsurizal, H.M.Harris, Irwan Natsir, Lukman Edy dan nama-nama lainnya. Walau secara formal LAMR selalu menyatakan sikap netral dalam pilkada, namun peran LAMR sebagai lembaga maupun tokoh-tokoh yang bermukim di dalamnya dianggap begitu

penting untuk meraih simpati masyarakat.

Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Riau tahun 2018 diikuti oleh 4 pasang calon yaitu Syamsuar & Edi Natar Nasution, Lukman Edy & Hardianto, Firdaus & Rusli Efendy, serta Arsyadjuliandi Rachman & Suyatno. Dari empat pasangan tersebut ada 3 calon Gubernur yang berasal dari Suku Melayu, dan satu lagi yaitu Arsyadjuliandi Rachman walau memiliki darah Suku Minang namun juga campuran dari Melayu tepatnya Kampar.

Riau dikenal memiliki 4 “batang sungai” yang mempengaruhi peradaban Melayu, yaitu Sungai Siak, Sungai Indragiri, Sungai Rokan, dan Sungai Kampar. Begitu juga dalam diversifikasi yang ada dalam Calon-calon Gubernur Riau. Syamsuar berasal dari Melayu Siak, Lukman Edy berasal dari Melayu Indragiri, Firdaus dan Asyadjuliandi Rachman dari Melayu Kampar, calon wakil gubernur Rusli Effendy berasal dari Melayu Rokan. Calon wakil Gubernur lainnya berasal dari Suku selain Melayu, namun telah tinggal dan besar di Riau sehingga sudah dianggap bersebatи dengan Melayu. Edi Natar Nasution berasal dari Rokan Hulu, Hardianto berasal dari Bengkalis dan Suyatno berasal dari Rokan Hilir.

Dorongan dari masyarakat agar LAMR menentukan sikap politik sangat tinggi baik dari masyarakat umum di luar kepengurusan LAMR maupun dari internal kepengurusan LAMR itu sendiri. Kondisi ini menjadi tekanan tersendiri bagi pengurus LAMR baik di provinsi maupun kabupaten. Namun LAMR sampai saat ini konsisten menunjukkan netralitas sikap sebagai lembaga, walau tentu pribadi-pribadi pengurusnya ada dalam tim-tim pemenangan calon.

Netralitas LAMR dalam Pilgubri 2018 ini mungkin terjaga karena pada dasarnya seluruh calon yang berkompetisi masih merupakan tokoh-tokoh Puak Melayu. Sehingga tidak perlu diambil tindakan-tindakan yang justru dapat merusak suasana kondusif dan memancing kontroversi di tengah masyarakat.

Selain pada saat pemilihan kepala daerah, peran LAMR dalam politik lokal juga sangat strategis dalam pengambilan kebijakan peme-

rintahan daerah. LAMR adalah tempat bagi dinas-dinas terkait untuk bertanya dan meminta tunjuk ajar agar kebijakan serta peraturan yang diambil mendapatkan persetujuan tokoh adat dan mendapatkan legitimasi secara informal. Kebijakan ini meliputi banyak aspek, bukan hanya seputar permasalahan adat, kebudayaan dan kesenian. Kebijakan ini dapat berupa bentuk arsitektural bangunan kantor pemerintah daerah, hingga yang baru-baru ini sedang di-perjuangkan oleh LAMR yaitu menyangkut Tanah Adat, Tanah Hikayat dan Tanah Ulayat yang disusun dalam RTRW Provinsi Riau.

Berbicara mengenai dinamika politik lokal, sejak dulu Provinsi Riau telah dikuasai oleh aktor-aktor politik tradisional yang berbasis golongan elit tradisional. Di Provinsi Riau selain kualitas serta rekam jejak pemimpin selama ini, ikatan etnisitas dan kekerabatan masih sangat kental. Faktor-faktor semacam ini secara langsung memberi celah bagi peranan patron sebagai pengarah opini publik yang potensial di ranah politik. Melihat lebih seksama kontestasi politik lokal dalam Pemilukada baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/Kota elit tradisional masih lebih cenderung dipengaruhi oleh ikatan-ikatan primordialnya.

Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Dibentuk berlandaskan peraturan daerah Provinsi Riau Nomor. 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau, Lembaga Adat Melayu Riau dibentuk sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan visi Provinsi Riau.

Tokoh adat yang berhimpun di LAMR juga merupakan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh sangat besar di daerahnya masing-

masing. Hampir seluruh calon kepala daerah yang ada di Provinsi Riau baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota pada saat pemilukada melakukan silaturahmi dan meminta restu dari LAMR pada awal pencalonannya. Begitu juga pada saat pelaksanaan pemerintahan, sering kali Pemerintah Provinsi Riau melakukan audiensi untuk meminta masukan dan saran yang dikenal dengan istilah “tunjuk ajar”. Tunjuk ajar ini meliputi banyak sekali bidang, bukan hanya kebudayaan, melainkan juga ke aspek hukum dan politik. LAMR juga memiliki wewenang pemberian gelar adat kepada kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Riau, serta kepada tokoh-tokoh yang dianggap berjasa kepada masyarakat Melayu.

Namun pada prakteknya masih ditemukan permasalahan-permasalahan dan rintangan bagi LAMR dalam menjalankan perannya terhadap politik lokal dan pembangunan di Riau. Peran LAMR masih belum maksimal terbukti adanya beberapa pemerintahan kota/kabupaten yang sepihak enggan melibatkan LAMR dalam keputusan-keputusan krusial yang seharusnya melibatkan tokoh adat. Contohnya baru-baru ini adalah kontroversi penggantian slogan Kota Pekanbaru yang sebelumnya adalah Kota Bertuah menjadi Kota Madani. Hal ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat terutama pertentangan dari tokoh-tokoh adat yang bermukim di Lembaga Adat Melayu Riau.

Selain itu juga dirasakan peran LAMR dalam pemilihan kepala daerah masih belum jelas. LAM kota Dumai pernah menunjukkan keberpihakan dan seruan dalam memilih putera daerah atau calon yang berasal dari Suku Melayu. LAM Kota Dumai mengeluarkan warkah yang menjadi pegangan bagi para pemilih dari suku Melayu. Sedangkan LAMR sendiri masih berpegang kepada prinsip netralitas LAMR walaupun banyak calon Kepala Daerah yang datang ke LAMR dalam berbagai bentuk kegiatan silaturahmi. Hal ini menjadi menarik karena paguyuban-paguyuban adat lainnya yang berada di Riau justru secara tegas dan jelas memihak pada calon tertentu, terutama pada kelompok mereka sendiri.

Walaupun LAMR terdiri dari berbagai tokoh, termasuk tokoh Politik dan memiliki pengaruh di daerahnya masing-masing, LAMR secara lembaga memilih untuk menjaga netralitas, preferensi individu di dalamnya tidak boleh mempengaruhi LAMR secara lembaga. Bahkan baru-baru ini terjadi penolakan oleh beberapa Tokoh senior di Provinsi Riau ketika nama mereka dimasukkan ke dalam SK Tim Sukses Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Firdaus-Rusli dengan argumen bahwa mereka tidak bisa turun secara praktis karena mereka adalah tokoh yang berhimpun di Lembaga Adat Melayu Riau.

Selain politik lokal berupa kejadian politik level daerah seperti pilkada, LAMR sendiri juga mengalami kejadian Politik tingkat nasional di daerah, seperti dinamika politik pada pemilihan Presiden. Pemilihan Presiden tahun 2019 telah dirasakan pengaruhnya pada dinamika Politik Lokal di Provinsi Riau, terutama dikarenakan disebutnya 2 bakal calon Wakil Presiden yang berasal dari Riau, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno dan Ustadz Abdul Somad.

LAMR mengadakan acara Tepuk Tepung Tawar untuk Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bentuk dukungan moral dan doa restu terhadap anak kemenakan yang telah dipilih sebagai salah satu calon Wakil Presiden. Tak lama berselang LAMR pun mengadakan penganugerahaan gelar adat kepada Petahana Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Gelar tersebut bernama Datuk Seri Setia Amanah Negara. Kedua kegiatan skala nasional ini mendapat perhatian dan sorotan yang begitu besar bukan hanya di tingkat daerah, melainkan juga di tingkat Nasional. Setelah LAMR mengadakan acara Tepuk Tepung Tawar, banyak organisasi serupa LAMR (Lembaga Adat, Kerajaan,dll) di daerah lain juga melakukan acara-acara serupa untuk Joko Widodo dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Kedua kegiatan ini pun tentunya menimbulkan pro dan kontra yang sangat masif baik di masyarakat Riau maupun internal LAMR itu sendiri. LAMR dianggap berpolitik dan melenceng dari peran sesungguhnya. Namun

tidak bisa dipungkiri sebagai sebuah Lembaga yang dianggap penjaga marwah, LAMR sendiri sering mendapatkan pengaduan dari berbagai elemen masyarakat dari berbagai bidang masalah, termasuk politik. Setiap ada pertentangan politik biasanya mau tidak mau akan menyeret LAMR ke dalamnya, LAMR sering kali diminta untuk menengahi dan menyelesaikan pertikaian politik di masyarakat.

Dinamika politik juga terjadi pada saat organisasi GP Ansor ingin mengadakan even “Kirab Satu Negeri, Zikir Kebangsaan”, banyak pihak yang datang ke LAMR menuntut agar acara ini ditolak. Bahkan sempat terjadi konselesi massa di Gedung Balai Adat. Bahkan Ketua Umum GP Ansor Provinsi Riau, Purwaji, yang sedang melakukan kunjungan untuk klasifikasi di Balai Adat, akhirnya diusir oleh massa yang berkumpul. Penolakan ini walau pun menggunakan alasan keagamaan seperti penolakan Islam Nusantara dan bentuk kekecewaan terhadap GP Ansor yang dianggap sering melakukan persepsi terhadap Ustadz Abdul Somad, namun juga sudah menjadi rahasia umum bahwa ini sarat dengan muatan politis, karena GP Ansor terang-terangan mendukung salah satu Calon Presiden.

LAMR tidak bisa terlepas dari dinamika politik, ada saja pihak yang akan menyeret LAMR ke dalam dinamika politik, baik itu dari internal LAMR maupun dari masyarakat. Dinamika politik yang terjadi di level lokal pun ternyata bukan hanya dari dinamika politik tingkat daerah, melainkan juga tingkat nasional.

Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dinamika yang terjadi pada Lembaga Adat Melayu Riau berkaitan dengan dinamika politik lokal, serta sikap LAMR dalam menghadapi dinamika tersebut, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 dan Pemilihan Presiden tahun 2019.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bermaksud mencari data, kemudian diambil kesimpulan. Lalu penulis menguraikan dan menganalisa data tersebut, meneliti serta menggambarkan secara lebih

jelas berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Proses pengumpulan data mengandalkan metode wawancara dan studi dokumentasi. Setelah memperoleh data melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data tersebut dianalisis sesuai jenis data yang diperlukan dengan menggunakan metode studi kasus deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika LAMR dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018

Pemilihan kepala daerah memberi kesempatan untuk melihat pola hubungan Antara kontestan dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). LAMR tidak dapat dilupakan pengaruhnya dalam pemilukada. Latar belakang etnis kandidat sedikit banyak mempengaruhi pilihan pemilih. Pemilih dalam pemilukada cenderung memilih karena adanya ikatan kekeluargaan, kekerabatan, maupun latar belakang etnis. Para kandidat kepala daerah seperti memiliki sebuah keharusan untuk mendapatkan restu dari LAMR, atau sekedar datang untuk menjalin silaturahmi. Silaturahmi ini walaupun akan selalu dibantah sebagai sebuah kegiatan yang bernuansa politis, namun sedikit banyak memiliki dampak politis.

Menjelang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Riau tahun 2018 pun, LAMR sudah kedatangan sejumlah bakal calon untuk mendapatkan dukungan atau sekedar restu dari LAMR. Diantaranya adalah Petahana Andi Rahman, Syamsuar, Syamsurizal, H.M.Harris, Irwan Natsir, Lukman Edy dan nama-nama lainnya. Walau secara formal LAMR selalu menyatakan sikap netral dalam pilkada, namun peran LAMR sebagai lembaga maupun tokoh-tokoh yang bermukim di dalamnya dianggap begitu penting untuk meraih simpati masyarakat.

Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Riau tahun 2018 diikuti oleh 4 pasang calon yaitu Syamsuar & Edi Natar Nasution, Lukman Edy & Hardianto, Firdaus & Rusli Efendy, serta Arsyadjuliandi Rachman & Suyatno. Dari 4 pasang calon tersebut, seluruh calon Gubernur atau diwakili calon Wakil Gubernur, telah

mendatangi LAMR pada saat Pemilukada berlangsung. Diantaranya calon-calon tersebut, yang mengagendakan khusus silaturahmi ke LAMR adalah Syamsuar, Lukman Edy, Rusli Effendy.

Pada tanggal 11 September 2018, Syamsuar mendatangi LAMR mengadakan sebuah dialog sekaligus silaturahmi dengan para tokoh dan pengurus LAMR. Dalam pertemuan ini Syamsuar menyempatkan diri menyampaikan presitasinya di Kabupaten Siak dalam mengembangkan kebudayaan Melayu, Syamsuar juga menyampaikan komitmennya dalam melanjutkan komitmen tersebut jika terpilih sebagai Gubernur Riau.

Pertemuan tersebut bukan sekedar silaturahmi biasa. Pertemuan ini membahas tentang prestasi dan komitmen Syamsuar dalam membangun kebudayaan serta adat selama memimpin Kabupaten Siak. Bahkan dalam forum tersebut juga disampaikan harapan oleh para Tokoh yang hadir jika beliau nantinya berhasil memenangkan Pemilukada. Syamsuar mencoba mempromosikan dirinya sebagai salah satu calon Gubernur Riau, walaupun agenda pertemuan ini bukanlah sebuah kampanye politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa LAMR memang menjadi faktor yang diperhatikan oleh Syamsuar dalam memenangkan Pemilukada ini.

Kesadaran Syamsuar akan peran LAMR dalam pemilukada ini ternyata juga dirasakan oleh calon-calon lainnya. Dalam kesempatan berbeda juga hadir Rusli Effendy yang merupakan calon Wakil Gubernur mewakili calon Gubernur pasangannya yaitu Walikota Pekanbaru, Firdaus, datang ke LAMR dalam rangka silaturahmi.

Ketua Umum Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ) yang juga Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) Perwakilan Jakarta H Rusli Effendi melakukan kunjungan ke Balai Adat Melayu Riau di Jalan Diponegoro Pekanbaru untuk bersilaturahmi dengan Pengurus LAM Riau, Kamis, 18 Januari 2018. Dalam kunjungan silaturahmi tersebut, Rusli juga meminta tunjuk ajar dari pengurus LAM Riau terkait rencana pencalonan dirinya sebagai

Wakil Gubernur Riau yang akan berpasangan dengan Dr. H. Firdaus, MT pada Pilgubri 2018.

Selain calon-calon mendatangi LAMR secara khusus dalam agenda silaturahmi, calon-calon juga hadir memanfaatkan momentum acara-acara adat. Seluruh calon misalnya hadir dalam acara penganugerahan Gelar Adat Kehormatan kepada Ustad Abdul Somad yang kebetulan juga diadakan dalam rangkaian pemilukada.

Dinamika LAMR dalam Menghadapi Pemilihan Presiden 2019

Selain politik lokal berupa kejadian politik level daerah seperti pilkada, LAMR sendiri juga mengalami kejadian Politik tingkat nasional di daerah, seperti dinamika pemilihan Presiden. Berbagai kejadian Politik Nasional di tingkat lokal menyeret LAMR masuk untuk menengahi dan bahkan menyelesaikan konflik-konflik politik

Dinamika politik nasional yang terjadi pada level lokal salah satunya dapat dilihat pada saat kerusuhan penghadangan Neno Warisman di Bandara Sultan Syarif Kasim II pada hari Sabtu, 25 Agustus 2018. Neno Warisman dihadang karena dianggap akan melakukan provokasi massa pada saat even #2019GantiPresiden di Pekanbaru. LAMR diminta berbagai elemen untuk menengahi permasalahan ini, bahkan tidak sedikit pihak yang minta LAMR untuk mengambil sikap mendukung salah satu pihak. Satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan pihak yang kontra hadir ke balai adat untuk meminta LAMR membatalkan kegiatan tersebut. Pada akhirnya dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa panitia kegiatan #2019GantiPresiden telah mengundurkan diri dan akhirnya pihak kontra pulang dan diminta komitmennya oleh LAMR untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan memicu pertikaian lebih lanjut.

Namun ternyata walaupun kepanitiaan telah membubarkan diri, Neno Warisman tetap datang ke Pekanbaru. Akhirnya pada hari Sabtu, 25 Agustus 2018 terjadi konsentrasi massa Pro dan Kontra yang cukup banyak dan berlangsung hingga malam hari. Salah satu pengurus

LAMR yaitu Datuk Budi Febriadi bersama laskar-laskar atas inisiatif sendiri hadir di lapangan untuk menengahi massa yang sudah berkumpul.

Setelah Ustadz Abdul Somad menolak untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto, akhirnya yang terpilih adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga Uno pernah menghabiskan masa kecilnya di Riau karena Ayahnya bekerja di PT.Chevron, oleh karena itu Sandiaga Uno dianggap sebagai anak kemenakan oleh LAMR. Maka ketika Sandiaga Uno maju sebagai salah satu calon Wakil Presiden, LAMR diminta oleh berbagai kalangan untuk melakukan sebuah acara adat untuk merayakannya. Maka LAMR pada saat itu memilih untuk mengadakan Tepuk Tepung Tawar sebagai simbol doa dan restu Orang Tua terhadap anak kemenakannya.

Kegiatan ini mendapatkan protes dari sejumlah kalangan terutama pendukung Calon Presiden pesaing, LAMR dianggap tidak netral dalam Pemilihan Presiden. Sementara banyak pihak justru mendukung dan memandang positif karena LAMR dianggap hanya mengadakan sebuah upacara adat yang lazim dilakukan. Karena sebelumnya LAMR juga pernah memberikan Tepuk Tepung Tawar pada Tokoh Nasional lainnya seperti Agus Yudhoyono dan Zulkifli Hasan.

Presiden Joko Widodo menerima gelar kehormatan adat sebagai Datuk Seri Setia Amanah Negara. Gelar kehormatan tersebut dianugerahkan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau pada Sabtu, 15 Desember 2018, di Balai Lembaga Adat Melayu Riau, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam adat setempat, gelar kehormatan tersebut dapat dimaknai dengan pemimpin negara yang berbahaya dan setia menunaikan amanah negara dalam melindungi serta mengayomi rakyat.

Sama seperti halnya acara Tepuk Tepung Tawar Sandiaga Uno, Penabalan Gelar Adat Joko Widodo juga menuai kontroversi dari berbagai pihak, terutama pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Salah satu yang paling vokal adalah Syarwan Hamid yang merupakan salah satu anggota Dewan Kehor-

matan Adat LAMR. Bahkan Syarwan Hamid mengembalikan gelar kehormatan yang pernah diterimanya dari LAMR yaitu Datuk Seri Lela Setia Negara. Syarwan menilai presiden Jokowi belum pantas menerima gelar adat tersebut. Ia juga kecewa dengan LAM yang seolah ujuk-ujuk memberikan penghargaan tinggi masyarakat Melayu tersebut pada tahun politik ini.

Sikap LAMR terhadap Dinamika Proses Pemilihan Gubernur Riau 2018

LAMR selain mendapatkan kunjungan dari para calon, juga mendapatkan banyak masukan serta tuntutan pada saat Pemilukada berlangsung. Selain tuntutan untuk tetap netral, LAMR juga mendapatkan tuntutan dari pada tokoh masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam Pemilukada agar Putera Melayu (anak watan) mendapatkan prioritas dalam pemilukada. Dalam pandangan Yusmar, LAM Riau perlu mengangkat dan mendorong tampilnya anak watan Riau, jelang pelaksanaan Pilgubri 2018 mendatang. Warkah yang berisi seruan untuk memilih anak Melayu pernah dikeluarkan oleh LAM Kota Dumai pada saat pemilihan Walikota Dumai pada tahun 2004 dan masih berlaku hingga saat ini.

Pada Pemilukada Riau 2018, muncul nama tokoh-tokoh Riau yang diklaim menjadi tim sukses pasangan calon Firdaus-Rusli Effendi. Sebanyak 12 orang tokoh Riau dan beberapa pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dicatut namanya masuk dalam tim kampanye pasangan bakal calon gubernur Riau dan wakil gubernur Riau, Firdaus-Rusli Effendi. Tokoh masyarakat Riau di antaranya, A Rivaie Rahman, Arsyad Rahim, Tengku Lukman Jaafar, Azaly Djohan, Ahmad Bebas, Wasnury Marza, Tengku Rasmara, Fachruddin Bakar, Makmur Hendrik, Marjohan Yusuf, Tengku Muchtar Anom, dan Syafei Yusuf.

Ke-12 tokoh tersebut menyatakan menolak dan tidak bersedia untuk menjadi anggota tim pemenangan, dan masing-masing tokoh tersebut menandatangi surat pernyataan. Salah satu alasannya adalah sebagian dari mereka duduk di pengurusan Lembaga Adat Melayu Riau, maka oleh karena itu mereka merasa harus bersikap independen dan netral.

Dari surat pernyataan tersebut dapat kita lihat pemahaman beberapa Tokoh Masyarakat bahwa dengan menjadi pengurus LAMR maka mereka harus menjaga netralitas, atau setidaknya tidak masuk dalam tim pemenangan. Pendapat masyarakat terbagi dua, yaitu LAMR harus memainkan peran dalam Politik Identitas terkait calon yang didukung dan dipilih haruslah Putera Melayu, pendapat lainnya adalah LAMR harus netral dan tidak berpihak. Dalam pemilukada ini akhirnya LAMR mengeluarkan warkah sehubungan dengan pemilukada 2018 yang dianggap penting untuk dipatuhi seluruh masyarakat di Riau.

Isi warkah tersebut sebagai berikut:

1. LAMR mengharapkan seluruh lapisan masyarakat di mana pun berada untuk menggunakan hak suara sebaik-baiknya dalam pemilihan Gubernur Riau 2018.
2. LAMR tidak berpihak kepada pasangan calon (Paslon) gubernur mana pun.
3. LAMR berharap agar semua pihak baik paslon gubernur, para pendukung, penyelenggara pemilihan maupun masyarakat dapat mempertahankan suasana kondusif yang sudah tercipta dalam tahap pemilihan gubernur.
4. LAMR meminta semua pihak baik pasangan calon dan penyelenggara pemilihan maupun masyarakat agar menaati segala ketentuan yang berlaku.
5. LAM Riau mengimbau semua kalangan untuk tidak melakukan politik uang, politik transaksional dan kampanye hitam.

LAM Riau pada akhirnya secara kelembagaan menegaskan netralitas dalam Pemilukada Provinsi Riau 2018. Walau secara pri-badi masih banyak pengurus LAMR yang terlibat aktif dalam tim pemenangan calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada akhirnya Syamsuar terpilih sebagai pemenang Pemilukada Provinsi Riau 2018. Setelah dinyatakan sebagai Gubernur Terpilih, pada hari Senin 16 Juli 2018, Syamsuar kembali mengunjungi LAMR untuk meminta LAMR mendukungnya dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Bentuknya berbagai macam, termasuk tidak segan menegur sapa terhadap hal-hal yang dinilai ganjil.

Dari kunjungan tersebut dapat kita simpulkan bahwa selain memandang penting restu dan tunjuk ajar dari LAMR pada saat pemilukada, Syamsuar juga merasa perlu dukungan LAMR pada saat menjabat sebagai Gubernur Riau nantinya.

SIMPULAN

Dari semua fakta di atas, terlihat LAMR sangat tidak bisa dipisahkan dari peristiwa-peristiwa politik lokal yang terjadi di Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan di dalam LAMR sendiri ada banyak Tokoh-Tokoh adat yang juga merupakan Tokoh-Tokoh masyarakat yang berpengaruh dan didengar oleh masyarakat banyak. Itulah mengapa banyak calon yang mencari simpati masyarakat lewat dukungan atau setidaknya kedekatan dengan Lembaga Adat Melayu Riau.

Terjadi perbedaan pendapat di dalam masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang tergabung di LAMR sendiri. Ada banyak tuntutan kepada LAMR untuk bersikap tegas dan menggunakan Politik Identitas agar memperbesar kesempatan untuk mendapatkan Gubernur yang merupakan putera Melayu. Ada ketakutan bahwa jika Provinsi Riau dipimpin oleh Gubernur yang tidak berasal dari etnis Melayu, maka etnis Melayu akan termarjinalkan secara politik. Seperti contohnya kurangnya jumlah orang Melayu yang menduduki jabatan strategis di perintahan daerah di Riau.

Pihak yang berpendapat bahwa LAMR harus terlibat secara praktis dalam politik lokal di Provinsi Riau, memandang sah-sah saja jika LAMR melakukan politik identitas, dan LAMR memiliki hak atas politik adat. Di satu pihak terutama dari Tokoh-Tokoh tetua menginginkan agar LAMR bersikap netral dan tidak memihak calon manapun. Mereka memandang sebagai tokoh adat selayaknya mereka berdiri di atas segala kepentingan, dan tidak terlibat dalam proses Pemilukada dan Pilpres secara praktis. Pada Pemilihan Presiden, LAMR memberi kesan bahwa calon yang memberi perhatian dan memiliki kedekatan dengan Masyarakat Adat Melayu Riau akan diberikan tempat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ann Schulz. 1979. *Local Politics and Nation-States*. California: Clio Press.
- Adi Suryanto (editor). 2008. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LAN.
- Cheppy Haricahyono, 1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Emmy Susanti Hendrarso. 2005. *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- Hendropuspito, 1994. *Sosiologi Agama. Kanisius*: Yogyakarta.
- Hilman Hadikusumo, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Josef Riwu Kaho, 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moeleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Masri Singarimbun, 1995. *Methode Penelitian Survey*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mohammad Daud Ali, 2014. *Hukum Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Riant Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono, 2001. *Methode Penelitian Sosial*, Bandung: Alfabeta.
- Soleman. B. Taneko, 1987. *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Bandung: Eresco.
- Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology, Ilmu Pemerintahan Baru 2*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Winardi. 2007. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Zainal Abidin. 2002. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.